



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang – Banten

### NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : 16 Maret 2022  
Waktu : 09.00 s.d 17.00  
Agenda Rapat : Rapat Pemetaan Inisiasi Perjanjian Kerja Sama yang Diintegrasikan ke dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran

- I. Rapat Pembahasan dibuka : Direktur Dekonsentrasi, Tugas oleh Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Bapak (Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si)
- II. Narasumber : 1. Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri (Dr. Safrizal, ZA, M.Si) dengan tema “ Gubernur Wakil Pemerintah Pusat”;  
2. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Bapak (Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si) dengan tema “Kebijakan Kerja Sama Daerah dalam Upaya Peningkatan pertumbuhan Ekonomi Daerah”;  
3. IRC Consultant NSLIC (Sad Dian Otomo, M.Si) dengan tema “Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam rangka Kerja Sama Daerah”.  
4. Dan Kepala Biro Pemkesra Provinsi Bali dengan tema”” Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Provinsi Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
- III. Rapat Pembahasan dibuka : Direktur Dekonsentrasi, Tugas oleh Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Bapak (Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si).
- IV. Narasumber : 1. (Dr. Prabawa Eka Soesanta) Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan tema “Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam rangka Kerja Sama Daerah”;  
2. (Putut Purwandono, S.E., M.Sc., M.S.E.) Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dengan tema “Pemetaan Kerja Sama Daerah di Pemkot Yogyakarta”;  
3. Praktisi Kerja Sama (Sad Dian Utomo, M.Si) dengan tema “Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam rangka Kerja Sama Daerah” dan “Simulasi Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam rangka

V. Peserta Rapat Koordinasi

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi kerja sama di provinsi seluruh Indones

VI. Kata Pengantar Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Bapak (Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si Beliau menyampaikan :

- Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, (Dr. Prabawa Eka Soesanta), mengingatkan tentang pentingnya peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang dibentuk oleh kepala daerah dalam membantu kepala daerah menyiapkan kerja sama di daerahnya masing-masing;
- Karena kerja sama yang dilakukan berdasarkan hasil pemetaan potensi urusan tersebut akan dijadikan prioritas, agar pelaksanaan kerja sama dapat melahirkan banyak Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Sayangnya selama ini masih banyak kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah hanya sampai sebatas Kesepakatan Bersama (KSB) tanpa ditindaklanjuti dengan PKS”. Hal itu disampaikan Prabawa kala membuka Rapat Pemetaan Inisiasi Perjanjian Kerja Sama yang Diintegrasikan ke dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran;
- Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional menuntut pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa;
- Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik atau menyeluruh, agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat didukung oleh Pemerintah Daerah;
- Dikatakan, Pemda mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional, karena Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
- Oleh karena itu, saat ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) telah menyusun pedoman pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dijadikan panduan bagi daerah untuk melakukan pemetaan urusan pemerintahan terkait kerja sama di daerah;
- Salah satu bentuk sinkronisasi dengan Pemda yang dilakukan Kemendagri adalah dengan menyelenggarakan Rapat Pemetaan Inisiasi Perjanjian Kerja Sama yang Diintegrasikan ke dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran.

Beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah perlu membentuk dan mengaktifkan TKKSD sebagai ujung tombak kerja sama di daerah, karena TKKSD yang akan memfasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah;
2. Pemda diharapkan telah melakukan pemetaan urusan pemerintahan yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerja sama dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
3. TKKSD diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi koordinasinya terutama kepada para OPD didaerahnya;
4. TKKSD diharapkan mampu melakukan diseminasi kepada seluruh OPD karena yang nantinya akan menggali potensi daerah adalah perangkat daerah;
5. Dalam melakukan pemetaan dan setiap pembahasan lebih lanjut, TKKSD juga diharapkan melibatkan OPD yang memiliki kewenangan terhadap perencanaan dan keuangan daerah hal ini dibutuhkan agar tindak lanjut pembuatan PKS berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;

6. Kepala OPD perlu mendapat delegasi secara tertulis dari kepala daerah untuk menandatangani PKS sebagai bentuk kepastian hukum;
7. Implementasi kerja sama daerah diharapkan dapat segera direalisasikan agar mendorong kebangkitan ekonomi di daerah, sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
8. Pemda agar mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan Kemendagri kepada unit pengelola kerja sama, mengingat masih adanya keterbatasan sumber daya manusia yang ada di daerah dalam memfasilitasi kerja sama;
9. Pemda yang sudah melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama segera meningkatkan statusnya menjadi PKS.

## VII. Kesimpulan :

Untuk itu, Pemerintah Daerah secara khusus juga diharapkan untuk melakukan koordinasi di antara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda), agar memasukkan program pemetaan urusan pemerintahan ke dalam perencanaan kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Notulis

Yustika Gunarsah, S.Sos, M.Si  
Nip. 19801101 200312 2003